

**PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA PEKINGSAWANG
KECAMATAN SIAU BARAT KABUPATEN KEPULAUAN SIAU
TAGULANDANG BIARO**

Rini Indryati Patasaka

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Indonesia

ABSTRAK

Dalam rangka menatasi berbagai permasalahan baik sosial, ekonomi, sarana-prasarana sekalipun yang ada di suatu desa, maka pemerintah desa dipandang perlu untuk mengambil sebuah kebijakan pemerintah desa. Proses pengambilan kebijakan pemerintah desa, umumnya melalui beberapa tahapan yaitu perencanaan kebijakan, pelaksanaan serta pengawasan kebijakan yang telah diambil. Implementasi kebijakan pemerintah desa yang telah berjalan ini, dipandang kurang optimal sehingga memberi kesan bahwa hanya memperhatikan pendapat dari pemerintah dan aparat desa semata. Penelitian ini dimaksudkan untuk bisa memperoleh gambaran dan pengetahuan nyata mengenai bagaimana implementasi kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan yang ada di Desa Pelingsawang serta faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana akan digambarkan secara naratif mengenai implementasi kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan serta faktor apa saja yang menjadi kendalanya. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif ini adalah peneliti itu sendiri. Namun ada beberapa instrument penunjang yang digunakan penulis yakni wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari informan, dapat dilihat bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan kebijakan yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Pelingsawang terhadap pembangunan cukup baik. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pendidikan masyarakat, tingkat ekonomi yang rendah, tingkat kesadaran masyarakat serta mental masyarakat. Sebab itu pendekatan persuasif dan intens dari pemerintah desa dipandang perlu ditingkatkan.

Kata Kunci : Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional yaitu upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan hidup masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945. Pada dasarnya pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahap-tahap tertentu

yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Mengacu pada pemahaman istilah pembangunan tersebut yang sekaligus juga merupakan komitmen nasional, maka untuk mewujudkannya diperlukan suatu kebijakan dan strategi yang tepat baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan itu sendiri.

Salah satu tugas utama pemerintah desa adalah menjamin terwujudnya pembangunan diwilayahnya. Faktor yang sangat menentukan menyangkut pembangunan yang bisa dilakukan pemerintah desa adalah masalah koordinasi serta integrasi dari semua pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat. Ketika komunikasi, koordinasi terbangun maka pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa akan mencapai sebuah tujuan yang dikehendaki, yang secara umum telah diamanatkan UUD 1945.

Dari indikasi yang menonjol dalam kaitan dengan masalah pada konteks ini adalah bagaimana dalam masyarakat modern serta kompleks terdapat berbagai macam alat pemerintahan yang masing-masing mempunyai kegiatan tersendiri dalam lapangan kerja bagi kesejahteraan masyarakat dapat diciptakan kesatuan dalam tugas dan kerja serta tujuan dari semua alat tersebut dan apakah dapat melibatkan masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Seiring dengan perkembangan dewasa ini dimana masyarakat makin kritis hal seperti itu tidak dapat dihindari lagi dengan adanya era globalisasi dimana ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang kian pesat perkembangannya

sehingga dorongan aparat pemerintah untuk menciptakan kondisi yang dinamis dalam setiap bidang kerja yang dilakukan mutlak diperlukan.

Dengan adanya perubahan itu, sudah tentu akan menuntut kebijakan pemerintah desa sebagai kepala pemerintahan yang benar-benar matang dan menyentuh permasalahan yang ada dilapangan. Untuk mencegah setiap kemungkinan akan terjadi sebagai akibat dari semakin kompleksnya penyelenggaraan pemerintahan perlu adanya koordinasi yang baik serta terpadu bagi segenap aparatur pemerintah terutama dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa, mengenai pokok-pokok arah dan kebijakan pembangunan aparat pemerintah, sebagai perencanaan dan pelaksana diperlukan juga uoaya pembangunan dirinya sendiri, mengingat mereka mempunyai tanggungjawab yang sangat besar dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Desa Pelingsawang sebagai salah satu desa yang ada di wilayah Siau Barat disinyalir dikategorikan sebagai desa dengan keadaan penduduknya dengan ekonomi menengah kebawah.

Hal ini menyebabkan, sikap apatis dari para warga masyarakat terhadap proses pembangunan desa secara umum. Warga desa lebih cendeurng memiliki pola

pikir bagaimana caranya mereka bisa memperoleh penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan hidup pribadi dan keluarganya ketimbang ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan dan kemajuan desaya.

Inilah yang menjadikan penulis tertarik melakukan penelitian engan judul “Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Pelingsawang Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro”.

Berdasarkan hal tersebut maka rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Bagaimana kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Secara etimologi, istilah kebijakan atau “*policy*” berasal dari bahasa Yunani “*polis*” berarti Negara. Kemudian dikaitkan dengan istilah bahasa Inggris “*police*” yang artinya berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Rose (dalam Winarno, 2007) mensyaratkan bahwa kebijakan public hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan, beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada sebagai suatu keputusan sendiri..

Easton (dalam Wahab, 2005) menjelaskan bahwa memahami kebijakan publik bukan hanya soal muatan dari kebijakan itu sendiri tetapi menyangkut siapa aktor-aktor yang terlibat dalam pengambilan/perumusan kebijakan publik. Hal ini diperjelas oleh Easton bahwa pada kenyataannya, kebijakan itu diformulasi oleh “penguasa” dalam suatu sistem politik yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Islamy (2009) memberikan pengertian mengenai kebijakan public adlaah serangkaian tindakna ayng ditetapkan dan dilaksanakan atau tdiak dilaksanakan oleh pemerintah, yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan sleurh nasyarakat. Ditegaskan lagi bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan public untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh masyarakat.

Sofian Effendi (2000) menyatakan bahwa "implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan atau menerapkan kebijakan setelah kebijakan itu disahkan untuk menghasilkan *outcome*

yang diinginkan". Berarti tidak hanya mengandung maksud terjadinya suatu proses tunggal atau berdiri sendiri, tapi ada proses lain yang dilakukan dalam upaya persiapan implementasi dan proses "yang sebenarnya" dari implementasi kebijakan itu sendiri.

2. Konsep Partisipasi Masyarakat

Secara etimologi kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris "*participation*" yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan kesadaran untuk turut ambil bagian dalam kegiatan organisasi.

Menurut Slamet (2003), ada tiga tradisi konsep partisipasi bila kita kaitkan dengan pembangunan yaitu sebagai berikut:

- a) Partisipasi politik (*political participation*), lebih berorientasi pada mempengaruhi dan mendudukkan wakil-wakil rakyat dalam lembaga pemerintah ketimbang partisipasi aktif dalam proses-proses pemerintahan itu sendiri.
- b) Partisipasi sosial (*social participation*), bahwa partisipasi ditempatkan sebagai *beneficiary* atau pihak diluar proses pembangunan dalam konsultasi atau pengambilan keputusan dalam semua tahapan siklus proyek pembangunan dari evaluasi kebutuhan sampai penilaian,

pemantauan, evaluasi dan implementasi. Partisipasi sosial dilakukan untuk memperkuat proses pembelajaran dan mobilisasi sosial. Dengan kata lain, tujuan utama dari proses sosial sebenarnya bukanlah pada kebijakan public tetapi pada keterlibatan komunikasi dalam dunia kebijakan public lebih diarahkan sebagai wahan pembelajaran dan mobilisasi sosial.

- c) Partisipasi warga (*citizenship*), menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi warga telah emngalih konsep partisipasi dari sekedar keperluan terhadap penerimaan derma atas kaum tersish menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan keijakan dan pengambilan keputusan diberbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan mereka.

3. Konsep Pembangunan

Dalam konteks ini, yang dibahas adalah konsep pembangunan desa.

Proses pembanguna desa merupakan suatu mekanisme perpaduan antara keinginan masyarakat dengan upaya pemerintah setempat. Tjokromidjojo (1990) merangkum pendapat beberapa ahli

menyangkut pembangunan yaitu sebagai berikut :

- a) Pembangunan desa adalah seluruh rangkaian usaha yang dilakukan dilingkungan desa yang bertujuan untuk mempertinggi taraf hidup masyarakat desa, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat dengan rencana yang dibuat atas dasar musyawarah dikalangan masyarakat desa.
- b) Pembangunan desa adalah pembangunan masyarakat desa dalam suatu proses dimana anggota masyarakat desa pertama-tama mendiskusikan yang kemudian memutuskan keinginan selanjutnya merencanakan dan mengerjakan bersama-sama untuk masyarakat memenuhi keinginannya.
- c) Pembangunan desa adalah adanya gerakan bersama untuk perubahan tingkat kehidupan masyarakat desa yang meliputi aspek-aspek kehidupan baik lahir maupun batin yang dilakukan secara swadaya sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
- d) Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan di desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kebijakan yang serasi antara pemerintah dan masyarakat dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarsa dan swadaya, gotong-royong masyarakat pada setiap pembangunan yang diinginkan.
- e) Pembangunan desa adalah suatu pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa dan didasarkan kepada tugas dan kewajiban masyarakat desa secara keseluruhan.
- f) Pembangunan adalah pembangunan yang sepanjang prosesnya masyarakat desa diharapkan berpartisipasi (ikut serta) secara aktif dan dikelola ditingkat desa.
- g) Pembangunan dari masyarakat pada unit pemerintah terendah yang harus dilaksanakan dan dibina terus-menerus, sistematis dan terarah sebagai bagian penting dalam usaha pembangunan Negara sebagai usaha yang menyeluruh.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka pembangunan bisa dilihat dari beberapa segi, yaitu pembangunan sebagai suatu proses, metode program atau suatu gerakan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Dipilihnya metode kualitatif ini karena penelitian ini

dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pembangunan, dimana semua gejala serta aktivitas dari implementasi tersebut lebih bisa dijabarkan secara naratif/deskriptif yang lebih mendetail.

Selain itu, penelitian kualitatif ini juga dipandang lebih dapat beradaptasi dengan pola nilai serta situasi sosial yang selalu berubah-ubah selama penelitian berlangsung (Moleong, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepala Desa selaku aparatur pemerintah dan sekaligus sebagai administrator di bidang pembangunan desa memiliki peran penting terutama dalam hal implementasi kebijakan termasuk di dalam program pembangunan. Oleh karena itu Kepala Desa diharapkan mampu membina, menggerakkan, mengarahkan serta mengawasi partisipasi masyarakat desa dalam program atau kegiatan pembangunan di desanya. Demikian halnya yang harus dilakukan oleh Kepala Desa Pelingsawang

Hal yang tidak bisa diabaikan bahwa setiap kebijakan ataupun keputusan dari pemerintah desa akan bisa diuji atau dinilai dilapangan, yakni pada saat implementasinya berlangsung. Apakah setiap kebijakan dapat diimplementasikan

dengan baik ataukah setidaknya bisa dirasakan hasil dari kebijakan tersebut. Ataukah malahan kebijakan tersebut dapat mengakomodir aspirasi/masukan dari masyarakat setempat ataukah hanya mengikuti kehendak dari pemerintah desa selaku pihak yang emnggeksekusi kebijakan tersebut sehingga tidak member dampak baik terhadap kebutuhan masyarakat desa secara umum.

Sehingga, dalam setiap ofrmulasi dan proses pengambilan kebijakan yang berimplikasi pada kehidupan masyarakat umum wajib mengakomodir aspirasi masyarakat setempat dan memprioritaskan pada kebutuhan-kebutuhan krusial warganya. Sebab tujuan utama kebijakan adalah mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Selain harus mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat, pemerintah desa juga perlu untuk member motivasi dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi aktif baik secara swadaya maupun swakarsa dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa Pelingsawang. Dalam mengupayakan terlaksananya pembangunan baik pembanguunan fisik maupun non fisik, seorang Kepala Desa diharapkan untuk sering melakukan upaya monitoring terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan tersebut.

Di Desa pelingsawang khususnya dari dari hasil penelitian yang penulis lakukan adalah menunjukkan bahwa kepala desa dan aparat sudah mempunyai kemampuan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat sehubungan dengan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa. Hal ini nampak dari seringnya pemerintah desa menggerakkan masyarakat untuk turun langsung berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, atau ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan fisik yang ada di desa. Pendekatan persuasive yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut cukup menggerakkan partisipasi warga desa. Disamping pendekatan pemerintah desa yang cukup baik, pemerintah desa juga memberi contoh tindakan nyata terhadap warga desa sehingga mereka merasa tergerak untuk ikut aktif dalam proses pembangunan di Desa Pelingsawang.

Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan di Desa Pelingsawang berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada yang berpartisipasi dalam bentuk ide-ide, tenaga bahkan uang.

Penilaian dan persepsi masyarakat Desa Pelingsawang tentang kemampuan pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat desa terhadap pembangunan dinilai cukup baik.

Dalam merencanakan dan akhirnya mengambil keputusan kebijakan public, pemerintah desa selaku eksekutor cukup mengakomodir pendapat serta kebutuhan masyarakat desa Pelingsawang. Begitu juga dalam tahap pelaksanaan kebijakan yang sudah diambil tersebut, pemerintah desa cukup menggerakkan kesadaran warga desa agar ikut terlibat dalam implementasi kebijakan serta ikut mengawasi pelaksanaannya. Hal ini dinilai cukup baik untuk kemajuan Desa Pelingsawang.

Meskipun demikian masih ada sebagian kecil masyarakat desa yang belum memiliki kesadaran untuk ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah ataupun pembangunan desa disebabkan karena kurangnya pemahaman, tingkat pendidikan yang rendah, bahkan disebabkan karena tingkat ekonomi yang rendah sehingga menyebabkan sekelompok masyarakat ini lebih mementingkan kebutuhan ekonomi pribadi dan keluarga mereka saja ketimbang berpikiran untuk ikut terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan desa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah yang ada.

Namun hal yang perlu diperhatikan adalah ketika ditemui di masyarakat bahwa mereka apatis terhadap

setiap program dan kegiatan pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah desa setempat adalah dengan alasan bahwa rasa ketidaksenangan terhadap kinerja pemerintah yang dianggap oleh sebagian kecil masyarakatnya tidak memberi kesejahteraan hidup mereka. Maka, pemerintah desa dipandang perlu untuk melakukan pendekatan personal yang lebih mendalam lagi kepada sebagian kecil warga masyarakat tersebut, sehingga bisa mulai dibangun komunikasi dan interaksi yang baik sehingga bisa membuka pola pikir mereka yang keliru dan akan berdampak baik terhadap kesadaran mereka dalam partisipasinya terhadap pembangunan desa yang selalu diupayakan oleh pemerintah desa.

Adapun terdapat beberapa faktor yang dianggap menghambat pelaksanaan kebijakan pemerintah Desa Pelingsawang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan di desa. Faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran masyarakat

Tingkat kesadaran dari seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan dapat dinilai cukup, namun masih terdapat sebagian masyarakat yang kurang memiliki kesadaran penuh. Hal ini tercermin ketika kelompok masyarakat ini hanya

berpartisipasi ketika didesak atau bahkan bisa dikatakan dipaksa oleh pihak pemerintah setempat,

2. Tingkat pendidikan masyarakat

Tingkat pendidikan seseorang umumnya menjadi daya ukur orang lain terhadap kemampuan dan pola berpikirnya. Sebab hal ini terbukti ketika kebanyakan masyarakat desa Pelingsawang hanya lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak terlalu penting dibandingkan dengan kepentingan pribadi dan keluarga. Sebab pembangunan yang ada biasanya kurang menyentuh sampai hidup keseharian mereka.

3. Sikap mental masyarakat

Sikap mental yang dimaksud adalah bagaimana tindakan dan perbuatan warga desa Pelingsawang dalam menerima hasil pembangunan yang telah diupayakan oleh pemerintah desa. Sebagian kecil warga sudah memanfaatkan hasil pembangunan dengan baik namun masih ada sebagian kecil yang belum merespon dengan baik.

4. Tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah

Kemampuan seseorang dalam sisi ekonomi selalu berdampak pada

kehidupan sosialnya. Kebanyakan dari warga masyarakat yang menyatakan bahwa tidak ingin ikut berpartisipasi aktif dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah terutama dalam bidang pembangunan adalah karena mereka menganggap bahwa kebutuhan pribadi dan keluarga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari jauh lebih penting dibandingkan dengan kepentingan umum.

Oleh sebab itu tugas besar dari pemerintah dan aparat desa adalah mulai merangsang perubahan pola pikir dari warga bahwa setiap kebijakan dan program yang diambil oleh pemerintah adalah semata-mata bagi kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya, yang juga merupakan salah satu perwujudan tujuan nasional.

PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemerintah Desa Pelingsawang mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan cukup baik, meskipun terkendala oleh masalah kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, serta pola

pikir warga yang memberi dampak pada kurangnya kesadaran warga untuk ikut berpartisipasi aktif dalam setiap kebijakan pemerintah desa terhadap pelaksanaan pembangunan yang sudah dirancang.

Saran yang bisa menjadi rujukan dengan tujuan perbaikan-perbaikan yaitu bisa berupa pendekatan persuasive dari pemerintah Desa pelingsawang dalam hal ini Kepala desa serta Perangkat Desa yang ada agar dapat terbangun mental yang baik. Sehingga akan merubah pola pikir mereka serta tindakan mereka yang akan turut memberi sumbangsi dan partisipasinya terhadap pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Islamy, Irfan M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Cetakan ke-15). Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi AKsara.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: eori dan Proses*. Yogyakarta: Med Press.